

## **KEKUATAN POLITIK BIROKRASI PADA KEMENANGAN AIRIN RACHMI DIANY DAN BENYAMIN DAVNIE DALAM PEMILUKADA TANGERANG SELATAN 2010-2011**

**R. Iwan Siswadijaya**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nasional

[Siswadijaya@civitas.unas.ac.id](mailto:Siswadijaya@civitas.unas.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pengaruh birokrasi dalam politik adalah penting untuk dikaji, terutama selama berlangsungnya kontestasi. Studi ini menyoroti birokrasi dan politik dalam pemilukada di Tangerang Selatan tahun 2010, yang dimenangkan oleh pasangan petahana, Rachmi Diany Airin dan Benjamin Davnie untuk menjabat sebagai Walikota dan Wakil dari hasil kontestasi tersebut. Metode kajian adalah penelitian kualitatif. Temuan kajian ini adalah bahwa selain beberapa faktor, politik birokrasi dalam kontestasi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kemenangan pasangan petahana.

**Kata kunci :** Politik Birokrasi, PEMILUKADA, Tangerang Selatan

### ***ABSTRACT***

*The influence of bureaucratic politics in South Tangerang General Election is very relevant to assess the political situation in the country especially when elections. With kualitati method and the case study approach, then we will see to what extent the bureaucratic politics the role power victory Rachmi Diany Airin and Benjamin Davnie in South Tangerang General Election 2010-2011*

**Key words:** *Politik Birokrasi, PEMILUKADA, Tangerang Selatan*

### **A. Pendahuluan**

Fenomena yang muncul dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung adalah maraknya praktik-praktik *money politics*. Pemilihan kepala daerah langsung akan diwarnai dengan kegiatan *money politics*, meski secara hukum belum terbukti adanya pelanggaran yang terbuka tentang hal ini, namun, sudah menjadi rahasia umum jika praktik *money politics* telah banyak terjadi di berbagai daerah. Para pasangan calon harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk partai, konstituen dan broker-broker politik di tingkat lokal. Bagi calon independen, uang yang dikeluarkan jauh lebih besar karena ia harus lolos melalui mekanisme partai. Untuk menjadi “calon jadi” dana yang dikeluarkan jauh lebih besar. PEMILUKADA langsung ternyata tidak bisa menghilangkan praktik-praktik *money politics* yang sudah membudaya di Indonesia. PEMILUKADA langsung hanya

memindahkan *locus money politics*, yang sebelumnya di tingkat DPRD, kini bergeser ke partai, broker politik dan para pemilih (Romli, 2007:347).

Salah satu pemilihan kepala daerah yang banyak menjadi sorotan berbagai kalangan dan masyarakat adalah PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada 2010 satu kali dan 2011 satu kali karena diduga banyak kecurangan dalam prosesnya, sehingga dilaporkan ke MK. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan calon pasangan Wali Kota Tangerang Selatan, Arsid dan Andreas Taulany. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan harus diulang: “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Tangerang Selatan.” (No. 16 bukti peringatan MK).

Pemilihan wali kota dan wakil wali PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan yang digelar 13 November 2010 hanya diikuti empat pasang kandidat. Empat pasangan calon terdiri dari dua jalur parpol, yakni pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie yang diusung sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Menata Tangerang Selatan, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Perjuangan Indonesia (PKPI) dan Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PPDI). Sedang pasangan Arsyid – Andre Taulani diusung oleh empat partai yaitu: Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara, dua pasangan yang dari jalur independen adalah Rhodiah Najiba – Sulaeman Yassin dan Yayat Sudrajat – Norodom Soekarno.

Hasil perolehan PEMILUKADA Februari 2010 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie yang merupakan pasangan dengan nomor urut 4 memperoleh 188.893 suara atau 46,43 persen. Arsyid – Andre Taulani, pasangan dengan nomor urut 3 memperoleh 187.778 suara atau 46,16 persen. Sedang nomor urut 1, Yayat Sudrajat – Norodom Sukarno memperoleh 22.640 suara atau 5,56 persen, Rodiyah Nadjibah – Sulaiman Yasin dengan nomor urut 2 memperoleh 7.518 suara atau 1,85 persen.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh KPU Tangerang Selatan di (MK) mengabulkan sebagian permohonan calon pasangan Wali Kota Tangerang Wisma Sahidah, UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat Timur, Rabu 17 November 2010, dalam PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan, jumlah suara yang tidak sah mencapai 10.919 suara. Dan total suara partisipasi mencapai 417.748 suara atau 57,06 persen dari 732.195 pemilih (**Error! Hyperlink reference not valid.** 11/hasil-penghitungan-KPU-pemenang-PEMILUKADA.html).

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menilai telah terjadi pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang digelar 13 November 2010. Namun menurut MK, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang

Selatan dan pasangan Arsid – Andreas Taulany tidak mempengaruhi perolehan suara. Sedang pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur. “Pelanggaran melibatkan struktur kekuasaan mulai pejabat dari tingkat Kota, Camat, Lurah dan Ketua RT/RW”. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada aparat disertai tekanan terhadap pegawai.

Selain itu, dalam amar putusan No. 209-210/PHPU.D/VIII/2010 Mahkamah Konstitusi juga membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang Selatan bernomor: 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010, tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara pada 17 November 2010 yang memenangkan pasangan Airin Rahcmi Diany dan Benyamin Davnie. Tetapi, MK menolak permohonan pasangan Arsid – Andreas Taulany untuk mendiskualifikasi Airin – Benyamin karena yakin jika pemungutan suara ulang bisa diperbaiki dengan pengawasan ketat dari Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan supervisi Bawaslu dan KPU Provinsi Banten.

Kondisi-kondisi tersebut tentu saja menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu untuk mencari benang merah dari konflik yang muncul pada proses PEMILUKADA serta dampak yang ditimbulkan oleh Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010 – 2011 saya melihat tiga permasalahan yang menarik dikaji, yaitu (1) kekuatan politik elite birokrasi dalam pemilihan Walikota KotaTangerang Selatan pada 2010 – 2011; (2) bentuk keterlibatan elite birokrasi dalam pemenangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie; dan (3) aplikasi polarisasi elite birokrasi di Kota Tangerang Selatan dalam PEMILUKADA 2010 – 2011.

## **B. Metode**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam mengkaji permasalahan di atas. Menurut Kirk dan Miller (1984:87), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya.

Menurut Moleong (2003:4-5), metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini lebih mudah disesuaikan bila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini, menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pendekatan kualitatif dalam komunikasi sendiri menekankan pada bagaimana sebuah pendekatan dapat mengungkapkan makna-makna dari isi komunikasi yang ada sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh berhubungan dengan pemaknaan dari sebuah proses komunikasi yang terjadi.

Sementara itu pendekatan studi kasus (*case study*) menurut Johnson (dalam Arifin, 1994:50), menyediakan cara untuk mempelajari sebuah sistem yang terbatas sepanjang waktu melalui detail-detail dan koleksi data yang mendalam serta melibatkan beberapa sumber informasi yang kaya dengan konteks. Tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Denni pendekatan studi kasus

merupakan studi yang menguji secara lengkap dan intensif segi-segi, isu-isu, dan mungkin peristiwa tentang latar geografik secara berulang-ulang. Jenis kasus sendiri tidak terbatas pada orang atau organisasi, tetapi juga batas sistem, program, tanggung jawab, koleksi atau populasi (Arifin, 1994:51).

### C. Kerangka Teori

Dalam mengkaji pokok permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki relevansi, terutama tentang Birokrasi, Elit Birokrasi, Otonomi Daerah. Dari beberapa teori tersebut saling berkaitan dalam menganalisis pokok permasalahan di atas.

#### 1. Birokrasi

Secara umum fungsi birokrasi diasumsikan sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik. Dilihat dari asal katanya, birokrasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *bureau* yang berarti *office table* (meja kantor) yang bertujuan sebagai alat kerja manusia atau dapat juga diartikan sebagai hukum yang menjadi dasar aturan-aturan dan *cracy* yang bermakna *power* (kekuasaan) dalam bentuk *authority* (kewenangan atau otoritas) dan *legitimation* (pengakuan). Secara ringkas birokrasi bisa diartikan sebagai orang yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan (Salim, 2002:97). Sementara Albrow (2005:19) dengan mengutip definisi Mill birokrasi sebagai suatu pekerjaan untuk menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional.

Birokrasi modern pertama kali dikemukakan Max Weber, seorang sosiolog ternama asal Jerman, yang dikenal melalui *ideal type* (tipe ideal) birokrasi modern. Konsep birokrasi inilah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara kita, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis dan efisiensi.

Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Secara filosofis dalam paradigma Weber, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan efisiensi. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subjektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya (Giddens, 2005:19).

Dalam Birokrasi sebagai salah satu organisasi modern, menurut Weber, di dalamnya terdapat kelompok yang dikuasai dan kelompok yang menguasai, kelompok yang dipimpin dan kelompok yang memimpin. Biasanya, kelompok yang

menguasai atau yang memimpin jumlahnya nyaris lebih sedikit dan sering disebut sebagai kelompok yang memerintah.

Kelompok ini memegang peranan penting dan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat dari kekuasaan sementara. Kelompok yang jumlahnya lebih besar dikontrol oleh kelompok yang jumlahnya lebih sedikit atau yang biasa disebut dengan elite.

Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Secara filosofis, dalam paradigma Weber birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan efisiensi. Dengan kata lain, pengertian efisiensi hanya digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai tidak ada unsur subjektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya (Giddens, 1986:194-195).

## **2. Elit Birokrasi**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam masyarakat apapun pasti terdapat stratifikasi sosial yang dibagi menjadi dua kelompok/kategori masyarakat, yaitu masyarakat yang memerintah dengan masyarakat yang diperintah, masyarakat yang dikuasai dengan masyarakat yang menguasai. Hal ini harus diakui bahwa pemilihan masyarakat seperti ini dan di mana-mana termasuk dalam sebuah organisasi.

Pareto (dalam Varma, 2003:2003) menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya, elit berasal dari kelas yang sama, yaitu erang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas yaitu pertama elit yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kedua, lapisan rendah (*non elite*). Kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai *fajar peradapan*, sehingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah (Varma, 2003:2003).

Birokrasi sebagai salah satu organisasi modern yang dikenal oleh Weber, dengan sendirinya mengalami pemilahan sebagaimana yang diyakini oleh para

teoritisi birokrasi yang lain --- yang di dalamnya terdapat kelompok yang dikuasai dan kelompok yang menguasai, kelompok yang dipimpin dan kelompok yang memimpin. Biasanya, kelompok yang menguasai atau yang memimpin jumlahnya nyaris lebih sedikit dan sering disebut sebagai kelompok yang memerintah.

Kelompok ini memegang peranan penting dan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat dari kekuasaan sementara, kelompok yang jumlahnya lebih besar dikontrol oleh kelompok yang jumlahnya lebih sedikit atau yang biasa disebut dengan elite.

Dengan berpegang pada ciri-ciri tersebut di atas, maka, untuk lingkup birokrasi di Indonesia, kelompok yang berjumlah sedikit adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural baik dalam kategori eselon yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Mereka menguasai politik, memonopoli kekuasaan walau setiap jenjangnya dibedakan dengan luas tidaknya wilayah kekuasaan yang dipegangnya (Varma, 2003:2002-2003).

### **3. Otonomi Daerah**

Secara epistemologi otonomi (*autonomy*) sendiri berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan; Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau the condition of living under one's own laws* (Sumaryadi, tahun:39). Tentang pengertian otonomi daerah, T. Parson memberikan pengertian yang cukup sederhana, yaitu *a Freedom which is assumed by a local government in both making and implementation its own decision* (Hidayat, 2001:2).

Dalam konteks Indonesia, menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Substansi pengertian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 juga tidak jauh berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004, bahwa otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kemenangan Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie**

#### **a. Hasil Perolehan Suara Calon**

Pada kali ini, masyarakat Kota Tangerang Selatan harus memilih yang terbaik dari empat pasangan yang dua di antaranya lewat jalur parpol sementara dua selebihnya lewat jalur independen. Keempat pasangan tersebut adalah: Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie diusung lewat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Menata Tangerang Selatan, yaitu Partai Demokrat PKS, Partai

GOLKAR, PDIP, PAN, PKB, PDS, PKPI dan PPDI . Sementara, pasangan Arsyid – Andre Taulani diusung lewat empat partai, yaitu, Partai GERINDRA, Partai HANURA, PPP dan PBB, sedang dua pasangan lain yang menggunakan jalur independen adalah Rhodiah Najiba – Sulaeman Yasin dan Yayat Sudrajat – Norodom Soekarno.

Hasil dari putaran pertama tersebut di atas dimenangkan oleh pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie yang berhasil meraih 188.893 suara atau setara dengan 46,43%, Arsyid – Andre Taulani berhasil meraih 187.778 suara atau setara dengan 46.16%, Yayat Sudrajat – Norodom Soekarno 22.640 suara atau 5.56% dan terakhir Rodiyah Najibah – Sulaiman Yasin mendapatkan 7.518 suara atau 1.85%.

Kemenangan tersebut memang sudah diduga oleh banyak orang atau para pengamat politik lokal, karena Airin Rachmi Diany memiliki kedekatan emosional dengan Gubernur Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Choisyah dan sebagian para anggota DPRD Provinsi Banten. Secara utuh, hasil yang diumumkan pada Sabtu, 17 November 2010, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9**  
**Hasil Pilkada Tangsel Putaran I**

	Serpong Utara	Serpong	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Jumlah
<b>Yayat – Norodom</b>	1.713	2.234	3.481	6.484	2.633	4.671	1.424	22.640
<b>Rodiyah – Yasin</b>	553	856	1.770	1.158	1.120	1.663	398	7.518
<b>Arsid – Andre</b>	16.781	24.288	40.647	25.387	22.503	46.553	111.619	187.778
<b>Airin – Benyamin</b>	18.058	18.541	42.086	32.041	26.352	40.679	111.136	188.893
<b>Jumlah</b>	<b>37.105</b>	<b>45.919</b>	<b>87.984</b>	<b>65.070</b>	<b>52.608</b>	<b>93.566</b>	<b>124.577</b>	<b>406.829</b>

Sumber: KPU Tangerang Selatan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dikenal dengan sebutan KKN pada Kota Tangerang Selatan begitu juga janji-janji muluk para politisi dan tokoh masyarakat yang mengharapkan dukungan masyarakat untuk mencapai tujuannya, ternyata telah membuat sebagian besar masyarakat Kota Tangerang Selatan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada yang berlangsung pada 13 November 2010. Secara tegas dapat dikatakan, sekarang, rakyat lebih menuntut bukti ketimbang janji. Sekitar 30% tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam-macam alasan yang dikemukakan. Untuk lebih jelas, perhatikan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang memiliki hak pilih sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 10**  
**Jumlah Pemilih Per Kecamatan**  
**Putaran Pertama Tahun 2010**

Kecamatan	Pemilih	Kenyataan	Selisih
Serpong Utara	65.306	37.906	27.400
Serpong	75.258	47.146	28.112
Pondok Aren	166.831	90.047	76.784
Ciputat	111.389	66.688	44.701
Ciputat Timur	108.557	53.783	54.774
Pamulang	104.783	96.538	68.245
Setu	40.071	25.159	14.912
<b>Jumlah</b>	<b>732.195</b>	<b>417.267</b>	<b>314.928</b>

Sumber: KPU Tangerang Selatan

Secara utuh, perhitungan hasil perolehan suara masing-masing pasangan kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di masing-masing kecamatan pada putaran pertama yang berlangsung pada 13 November 2010, yang dihimpun oleh KPUD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Pasangan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie berhasil meraih 188.893 suara atau setara dengan 46,43%, Arsyid – Andre Taulani berhasil meraih 187.778 suara atau setara dengan 46.16%, Yayat Sudrajat – Norodom Soekarno 22.640 suara atau 5.56% dan terakhir Rodiyah Najibah – Sulaiman Yasin mendapatkan 7.518 suara atau 1.85%.

Dari hasil tersebut di atas, dapat dinilai dengan lebih jelas lagi bahwa PILKADA Kota Tangerang Selatan yang berlangsung pada 13 November 2010, diikuti 732.195 pemilih, yang menggunakan hak pilih 417.267 suara, yang tidak menggunakan hak pilih 314.928.

#### **b. Basis Dukungan Yang Menyatu**

Kemenangan Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie yang diusung lewat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Menata Tangerang Selatan, yaitu Partai Demokrat, PKS, Partai GOLKAR, PDIP, PAN, PKB, PDS, dan PPDI, serta dukungan dari Gubernur Provinsi Banten yang terhitung masih keluarga Airin, kemenangan Airin memang sudah diperhitungkan oleh kebanyakan orang yang bermukim di Kota Tangerang Selatan.

Tetapi jika mau melihat pada kenyataan, terutama Partai Demokrat, Partai GOLKAR dan PKS, yang tergabung dalam “Koalisi Menata Tangerang Selatan” sudah barang tentu ketiga partai politik tersebut tidak mungkin melepaskan kadernya, Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie.

Partai Demokrat yang sedang naik daun, Partai GOLKAR yang ingin mengembalikan kejayaan masa lalunya dan PKS yang dianggap sebagai partai politik pembaharu di Indonesia, tentu kurang memiliki suara yang cukup signifikan di DPRD Kota Tangerang Selatan, sedangkan PDIP, PAN, PDS, PKB, PKPI dan PPDI sebagai penyeimbang dukungan terhadap ketiga partai utama yang mendukung Airin – Benyamin.



Dengan menyoroti ketiga partai yang tersebut di atas, maka lebih jelasnya akan tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 11**  
**DPRD Tangerang Selatan**  
**Hasil Pemilu 2009**

No	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	12
2	Partai Keadilan Sejahtera	7
3	Partai Golkar	6
4	PDIP	4
5	Partai Amanat Rakyat	3
6	Partai Persatuan Pembangunan	2
7	Partai Gerindra	2
8	Partai Hanura	2
9	Partai Damai Sejahtera	2
10	PKB	2
11	PKPB	1
12	PPDI	1
13	Partai Bulan Bintang	1
<b>Total</b>		<b>45</b>

Sumber: KPU Tangerang Selatan

Dengan basis dukungan partai politik yang menyatu Partai Demokrat 12 kursi, PKS 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, PDIP 4 kursi, PAN 3 kursi PDS 2 kursi, PKB 2 kursi, PKPI 1 kursi dan PPDI 1 kursi secara kasat mata terlihat betapa kuatnya pasangan Airin – Benyamin.

Selain Partai Demokrat yang merupakan partai pemerintah, serta Partai GOLKAR yang pernah berjaya pada masanya, yang juga harus menjadi perhatian adalah kekuatan masa pendukung PDIP, PKPI dan PPDI. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis Nahdliyin memiliki kekuatan masa yang tidak perlu diragukan lagi. Begitu juga masa Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis Muhammadiyah. Oleh karena itu, Kota Tangerang Selatan dengan penduduknya yang mayoritas Islam, praktis mendukung pasangan Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie. Seiring dengan itu, masa Partai Damai Sejahtera (PDS) juga memiliki suara yang menyatu dan demikian solid, sementara, Partai GERINDRA Partai HANURA, PKPB dan PPDI, sebagai partai yang boleh dikatakan baru muncul dalam percaturan politik nasional, walaupun sebagian besar pengurusnya merupakan “pemain lama” sudah barang tentu menggunakan kesempatan koalisi ini sebagai uji coba dengan berjuang habis-habisan untuk meraih simpati masyarakat pada saat itu dan untuk PEMILU yang akan datang.

Akibat dari pimpinan partai politik hanya mengingat konstituennya ketika diperlukan, ketika PILKADA atau Pemilu saja, sejatinya, jika memperhatikan tabel 3.3. (lihat halaman 47) dukungan partai politik boleh dikatakan tidak terlalu signifikan. Ditengarai, kemenangan yang berhasil diraih oleh pasangan Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie juga tidak luput dari peranan para birokrat dan elit birokrasi. Untuk mendapatkan kemenangan sesaat, para birokrat praktis melupakan Birokrasi Weber yang berparadigma netral dan bebas nilai sementara, karena menguasai politik sekaligus kekuasaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki motto Abdi Negara dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi mencoba untuk mencari kesempatan dalam kesempitan di dalam Kota Tangerang Selatan. Untuk mendapatkan keterangan yang menunjang analisis seputar keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penulis sengaja tidak mendatangi tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun dari kalangan Partai Politik dan Organisasi Masa, mengingat, mereka akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan bahasa politik yang bersayap atau bermakna ganda. Untuk itu, penulis sengaja mencari reponden atau informan dari kalangan masyarakat biasa, yang benar-benar memiliki harapan dari Kota Tangerang Selatan ini. Berikut penulis paparkan lima pengakuan dari masyarakat yang dianggap tahu tentang keterlibatan PNS di dalam memenangkan Airin – Benyamin pada Kota Tangerang Selatan. Tersebut: Supriyanto, 40 tahun, Satpam Kompleks Kedaung Hijau secara tegas mengatakan:

“Kemenangan Airin sudah bisa ditebak. Pertama, ia adalah adik dari Gubernur Banten yang memiliki uang berlimpah. Kedua, Airin banyak membantu membetulkan jalan-jalan yang rusak dan membagikan sembako di berbagai tempat pengajian ibu-ibu. Boleh dikata, 60% suara sudah ada di tangannya. Bahkan di tempat saya tinggal, Gang H. Betong, RT dan RW minta warga untuk mencoblos Airin sebagai tanda terima kasih karena gang yang selama ini becek, sudah di konblok” (Wawancara dengan Supriyanto, Satpam kompleks Kedaung Hijau, 1 Desember 2011).

Selaras dengan yang dikatakan di atas, Dedeh Farida, 55 tahun, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki keluarga yang bekerja di Kelurahan Kedaung menegaskan:

“Dua hari, adik almarhum ayahnya anak-anak datang ke rumah, selama ini jarang datang, dia meminta kita semua, ada delapan orang untuk mencoblos Airin. Katanya, kalau Airin sampai kalah, maka, semua pegawai bakal diganti dengan baru. Oleh karena itu, dia minta tolong agar Airin bisa menang dan dia tetap bisa bekerja di sana” (Wawancara dengan Dedeh Farida, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki keluarga yang bekerja di Kelurahan Kedaung, 1 Desember 2011).

Bambang 50 tahun, pemilik toko kelontong di Komplek Perumahan Alfa Blok A, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kelurahan Paku Alam:

“Ia mengatakan, tiap hari memang pegawai kelurahan belanja di toko saya, ya pegawai itu seririg melontarkan atau memesan kata-kata demikian Pa Bambang jangan lupa loh pilih nomor urut empat, dan jangan lupa kasih tahu istri dan anak bapak dan juga tetangga bapak yang lain, Tambrin 20 tahun, mahasiswa kompleks perumahan melati mas Hj. Tuti, 40 tahun, ibu rumah tangga, Jl. Taman Griya Hijau, Alam Sutra” (Wawancara dengan Bambang, pemilik toko kelontong di Komplek Perumahan Alfa Blok A, 1 Desember 2011).

Kelima paparan di atas merupakan bukti betapa para birokrat dan elit birokrat turut “bermain dan berpihak kepada pasangan Airin – Davnie di dalam pelaksanaan Kota Tangerang Selatan.

## **2. Perolehan Suara Arsyid – Andre**

### **a. Dukungan Berbasis Partai Politik**

Sudah barang tentu hal tersebut di atas berbeda dengan yang dialami Arsyid – Andre Taulani yang diusung lewat empat partai, yaitu Partai GERINDRA, Partai HANURA, PPP, dan PBB serta berhasil meraih 187.778 suara atau setara dengan 46.16%.

**Tabel 12**  
**Jumlah Kursi Partai Politik Pendukung Arsyid-Andre Taulani**

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
1	Partai Gerindra	2
2	Partai Hanura	2
3	Partai Persatuan Pembangunan	2
4	Partai Bulan Bintang	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber: KPU Tangerang Selatan

Padahal pada kenyataannya, pasangan tersebut berhasil meraih suara 187.778 suara. Oleh karena itu, dapat ditarik suatu benang merah bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Tangerang Selatan benar-benar mengharapkan figur seorang pemimpin yang jauh dari KKN, egaliter, dan berwawasan. Dengan kata lain, masyarakat Kota Tangerang Selatan menginginkan terjadinya suatu perubahan di berbagai bidang di lingkungan kotanya.

### **b. Dukungan Popularitas**

Sejatinya, apa yang berhasil dicapai oleh Arsyid – Andre Taulani dapat digolongkan sebagai sesuatu yang luar biasa dengan kata lain, masyarakat Tangerang Selatan benar-benar menginginkan perubahan yang berarti di masa depan.

Ekspektasi masyarakat, yang sebagian besar adalah sosok yang menginginkan perubahan, bahkan generasi muda yang merupakan pemilih pemula serta kalangan ibu-ibu, ternyata lebih mengenal sosok Andre Taulani salah seorang pemain Opera Van Java yang setiap malam tayang di Trans-7. Boleh dikata, begitu

deklarasi pasangan ini digelar, maka, figur Andre Taulani pun menjadi buah bibir banyak orang.

Tidak ada yang bisa menepis betapa Andre Taulani berhasil merasuk di berbagai kalangan, mulai dari lapisan bawah sampai dengan lapisan teratas, begitu juga pemilih lintas suku dan lintas agama tidak hanya pemilih berpendidikan tinggi dan menengah, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar pun mengidolakannya. Inilah salah satu kelebihan dari pasangan Arsyid – Andre Taulani. Jika kita mau jujur, pasangan Arsyid – Andre Taulani adalah pasangan yang paling ideal di dalam kota Tangerang Selatan. Arsyid yang telah berpengalaman mencoba menggalang suara lewat kekuatan partai politik pendukungnya, sementara Andre Taulani menggalang suara lewat popularitasnya. Bukti dari keberhasilan itu akan tampak dengan jelas pada hasil perhitungan suara sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Hasil Tansel Putaran I**

	Serpong Utara	Serpong	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Jumlah
Arsid – Andre	16.781	24.288	40.647	25.387	22.503	46.553	11.619	187.778
Airin – Benyamin	18.058	18.541	42.086	32.041	26.352	40.679	11.136	188.893
Selisih	1.277	5.747	1.439	6.654	3.849	3.874	483	1.115

Sumber: KPU Tangerang Selatan

Ekspektasi masyarakat menunjukkan betapa mereka amat mengharapkan pasangan Arsyid – Andre Taulany menjadi orang nomor satu di Kota Tangerang Selatan begitu terasakan di mana-mana. Sudah barang tentu popularitas ini tidak datang dengan sendirinya, beberapa informan yang berhasil ditemui penulis secara lugas hanya mengatakan bahwa mereka menginginkan suatu perubahan menurut mereka, pasangan Arsyid – Andre, egaliter, cerdas, bersih dan religius.

Hal ini terungkap dari empat pernyataan yang berhasil penulis himpun di sekitar Perumahan Kedaung Hijau, Jalan Aria Putera, Ciputat pada Kamis, 1 Desember 2011. Fandi Purnomo, 26 tahun, swasta, mengatakan :

“Saya hanya menginginkan perubahan. Arsyid yang mantan birokrat diharapkan mampu mengubah performance-nya setelah duet dengan Andre yang egaliter. Dengan begitu, persoalan kemacetan, sampah, dan masalah-masalah sosial lainnya bisa diatasi karena mereka merasa dimanusiakan. Itulah harapan saya dan begitu juga harapan yang lainnya” (Wawancara dengan Fandi Purnomo, Warga Perumahan Kedaung Hijau, 1 Desember 2011).

Hal senada juga dilontarkan oleh Nova Suci Rahmawati, 21 tahun:

“Soalnya Andre ganteng. Kita kan bosan ngeliat birokrat yang sok jaim. Kalo begitu terus, rakyat jadi malah takut. Padahal akan lebih baik rakyat segan, bukan takut. Dengan begitu, maka, program yang disampaikan bakal

bisa dicerna dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Tidak perlu pakai Satpol PP segala” (Wawancara dengan Nova Suci, Rahmawati, Warga Perumahan Kedaung Hijau, 1 Desember 2011).

Dua mahasiswi yang berhasil penulis jaring bahkan berharap, lewat “banyolannya” khas Opera Van Java (OVJ), maka Andre bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunannya dengan gaya yang santai, egaliter, dan tidak berkesan menggurui atau memerintah. Menurut keduanya, gaya ini yang belakangan hilang dari para pemimpin kita. Dan berikut nukilan komentarnya:

“Kepiawaian Andre dalam mengolah kata di OVJ, bisa menjadi bekal yang positif ketika ia menjadi Wakil Walikota Tangsel. Ia bisa berkomunikasi dengan siapa pun gayanya yang khas dan tidak terkesan memerintah atau menggurui. Dengan begitu, biasanya, apa yang disampaikan bisa dicerna dan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dan mereka akan menjalankan hal itu dengan sukarela. Bukan karena terpaksa.” **Dwenty Eka Putri, 19 tahun, mahasiswi.**

“Yang pasti, masyarakat Tangerang Selatan ingin melihat sesuatu yang baru. Dengan pengalamannya sebagai artis yang banyak melihat keadaan di luar Jawa, maka, yang baik bisa diambil dan diterapkan di sini. Dengan begitu, Tangerang Selatan bisa tampil beda dari yang lain” **Ratu Devi Azizah, 20 tahun, mahasiswi.**

Empat pernyataan yang berhasil penulis himpun di atas merupakan suatu bukti bahwa Andre Taulany merupakan sosok yang harus diperhitungkan. Ketenarannya lewat OVJ, ternyata mampu mendongkrak perolehan suara pada PILKADA di Kota Tangerang Selatan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengaruh figur amat dirasakan oleh sejumlah Tim Kampanye dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Figur ada kaitannya dengan struktur sosial masyarakat Tangsel dan Banten pada umumnya. Dalam masyarakat Kota Tangerang Selatan agama menjadi sumber rujukan dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama menjadi panutan masyarakat, baik masalah pribadi, sosial, pemerintahan sehingga di Kota Tangerang Selatan pemuka agama memiliki peran sentral. Maka pilihan-pilihan politik biasanya mengarah ke tokoh agama yang direkrut oleh calon figur, kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya, karena ciri-ciri memiliki pesantren dan memiliki santri sebagai basis yang kuat dan luas, melalui pengajian yang aktif memudahkan sosialisasi. Sementara di Kota Tangerang Selatan tidak begitu menonjol pemimpin informal. Faktor pemilih yang mengedepankan hubungan emosional. Tidak menjadikan program kerja yang ditawarkan para calon sebagai pertimbangan untuk memilih” (Wawancara bersama Mohammad Subhan, Akademisi dan anggota KPU Tangsel: Kamis 1 Desember 2011).

### **c. Melemahnya Peran Partai Koalisi**

Dalam Kota Tangerang Selatan, penulis melihat peran partai Politik tidak jauh lebih besar dari peran figur calon hal ini terbukti, walau diusung oleh sembilan

partai politik, empat di antaranya boleh dikata sebagai partai politik yang berpengaruh, serta keluarga Gubernur Provinsi Banten, tetapi, hasil suara yang berhasil diraih pasangan Airin – Benyamin tidak terlalu signifikan.

Dengan kata lain, partai politik hanya dipakai sebagai legitimasi atau hanya untuk memenuhi persyaratan pencalonan belaka. Secara tegas dapat dikatakan, peran Airin dengan mendatangi berbagai tempat pengajian ibu-ibu, membagikan sembako, serta memperbaiki berbagai sarana umum yang rusak, senam pagi disetiap hari minggu dengan berpindah-pindah tempat adalah merupakan faktor perekat yang kuat terhadap para konstituennya dengan kata lain, selain lewat elit birokrasi, namun, prestasi individu calon menjadi nilai jual yang amat kuat sekarang, bukan lagi seberapa banyak perolehan suara suatu partai politik dalam pemilu legislatif.

Hal ini tampak dengan jelas pada tabel 3.5. Pasangan Airin – Benyamin hanya mampu menang “tipis” di empat kecamatan yakni: Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur.

Sejatinya, fenomena tersebut sudah difahami oleh pasangan Arsyid – Andre Taulany. Tanpa mengabaikan peran partai politik yang mengusungnya, lewat perannya di OVJ, Andre pun berhasil menebarkan kepopulerannya kepada seluruh masyarakat yang setiap hari menyaksikan penampilannya. Andre berhasil merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, ia berhasil melintasi jurang pendidikan bahkan jurang keyakinan / agama untuk itu, dapat ditarik suatu benang merah bahwa peran figur dan ketokohan yang bersangkutan memudahkan partai politik pengusungnya melakukan sosialisasi dan mempengaruhi para calon pemilihnya, selanjutnya, lewat OVJ, Andre bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki basis sosial yang harus diperhitungkan, terakhir, lewat GVJ pula Andre berhasil melakukan *direct campaign* (kampanye secara langsung) kepada basis sosial yang diharapkan mendukungnya. Hal ini tampak dengan jelas pada tabel 3.5 (halaman 52). Andre berhasil memenangkan suara di tiga kecamatan: Kecamatan Serpong, Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Setu, dari tujuh kecamatan yang ada.

Dalam mengkaji kemenangan yang berhasil diraih oleh Airin Rachmy Diany – Benyamin Davnie yang diusung lewat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Menata Kota Tangerang Selatan, yaitu Partai DEMOKRAT, PKS, Partai GOLKAR, PDIP, PAN, PKB, PDS, dan PPDI penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki relevansi, terutama tentang Birokrasi, Elit Birokrasi Otonomi Daerah. Menurut hemat penulis, beberapa teori tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menganalisis pokok permasalahan tersebut.

Birokrasi modern pertama kali dikemukakan oleh Max Weber, seorang sosiolog ternama asal Jerman yang dikenal melalui *ideal type* (tipe ideal) birokrasi modern. Konsep birokrasi inilah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara kita, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Namun, tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis dan eisiensi.

Sementara, Pareto (dalam Varma, 2003) menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil

menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Lebih lanjut, Pareto membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kedua, lapisan rendah (*non elite*).

Dalam konteks Indonesia, menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Substansi pengertian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 juga tidak jauh berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004, bahwa otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Faktor Kemenangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie**

Dari jumlah pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 738.181 orang, sementara, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya 458.282 orang, sedang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 279.899 orang. Jika diperhatikan dengan saksama, maka, jumlah pemilih pada PEMILUKADA ulang Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih banyak dibanding dengan yang sebelumnya yaitu 732.195 orang pada PEMILUKADA 13 November 2010, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 417.267 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 314.928 orang.

Dan jumlah pemilih, baik yang sah dan tidak sah sebesar 417.748 suara, tampak dengan jelas betapa sekitar 50 persen lebih masyarakat Kota Tangerang Selatan turut berpartisipasi dalam PEMILUKADA. Dengan kata lain, secara kuantitatif jumlah pemilih pun meningkat tajam, hal ini bisa terjadi ada peningkatan dari pemilih pemula, seperti kalangan siswa menengah atas, atau kalangan TNI dan Polri yang mulai masuk masa purna tugas. Dari total data pemilih tetap, jumlah pemilih perempuan 368.935 orang lebih kecil dibanding dengan pemilih laki-laki 369.246 orang. Dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana tersebut di atas, maka, pada pelaksanaannya diperlukan 1.890 Tempat Pemungutan Suara/TPS (Sumber: KPUD Kota Tangerang Selatan tahun 2011).

#### **1. Kekuatan Mesin Partai**

Keberhasilan partai koalisi, walaupun kecil, di dalam membangun citra dan isu kampanye strategis berhasil ditampilkan dengan baik oleh Partai GERINDRA, Partai HANURA, PBB dan PPP yang mengusung pasangan Arsyid – Andre, partai koalisi (walau kecil) tetapi mampu menciptakan fakta politik baru. Walau bertentangan dengan kekuatan partai koalisi besar yang dominan pada pemilu

legislatif 2010, tetapi, persaingan perolehan suara yang diraih oleh pasangan Arsyid – Andre tidak terpaut jauh. Fenomena politik lokal yang sedemikian, menurut Firdaus Nur, sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima (5) fenomena politik dalam konteks PEMILUKADA langsung, yaitu: (1), Adanya kecenderungan masyarakat memilih kandidat yang memberi signal yang kuat melayani rakyat. Masyarakat dapat dengan jelas melihat komitmen melayani masyarakat, spontanitas dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil. (2) Masyarakat mengalami kejenuhan politik, sehingga tertarik dengan kandidat tokoh-tokoh baru atau publik figur. (3) Mesin politik tidak dominan mempengaruhi hasil PEMILUKADA, misalnya Kepala Daerah terpilih walaupun bukan berasal dari partai besar, atau koalisi. Banyak kandidat yang diusung oleh partai besar tidak terpilih dalam PEMILUKADA langsung. (4) *Direct campaign* dan sentuhan personal relatif lebih efektif, kandidat melakukan kunjungan ke pengajian-pengajian dan pasar-pasar serta tempat publik secara langsung bukan hanya di podium. (5) Uang bukan ukuran, karena walaupun masyarakat menerima uang santunan, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan pilihan politiknya (Firdaus Nur, *PEMILUKADA dan Pelayanan Publik*. [www.antaraneews.com/berita/25](http://www.antaraneews.com/berita/25) Juni 2008).

Selain 5 (lima) yang tersebut di atas, keberhasilan pasangan Arsyid – Andre mengimbangi hasil perolehan suara Airin – Benyamin juga diakibatkan oleh kecenderungan perilaku pemilih untuk mencoba memilih pasangan yang merakyat, serta jenuh terhadap pasangan arogan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh Jawara Banten. Namun menurut pendapat penulis, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkait erat dengan minimnya peran kekuatan mesin partai untuk memenangkan pasangan yang diusung secara mutlak, di antaranya adalah :

- 1) Mandulnya jaringan politik partai. Partai gagal melakukan mobilisasi basis dukungan pemilih secara solid.
- 2) Kurangnya support dari pemilih partai atau anggota partai terhadap pasangan yang dicalonkan. Karena, calon yang diusung tidak sesuai dengan harapannya.
- 3) Minimnya akseptabilitas atau popularitas figur para calon yang diusung oleh partai koalisi.

Bukti lain dari tidak bekerjanya mesin partai secara maksimal juga bisa ditilik lebih jauh sebelum masa kampanye diselenggarakan, yaitu “tindakan awal partai politik” sejak berlangsungnya proses seleksi para bakal calon.

Padahal, pemilihan kandidat yang tepat bisa menggiring pemilih partai agar memilih kandidat yang telah ditentukan oleh partai. Tak ada yang bisa memungkir, setidaknya ada dua cara agar mesin partai dapat bekerja dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung. *Pertama*, lewat organisasi yang terstruktur, dan menjangkau ke pemilih di bawah. Organisasi inilah yang akan bergerak sebagai mesin dalam mengenalkan kandidat dan mengajak pemilih diakar rumput agar memilih kandidat yang didukung oleh partai. Dari cara pertama ini, kandidat tidak menjadi faktor yang penting. Tetapi, partailah yang menjadi faktor kunci dalam memenangkan pemilihan, dengan kata lain, kandidat yang tidak dikenal dan tidak didukung bisa diubah oleh partai menjadi dikenal dan didukung oleh partai. Cara *kedua* adalah, memilih figur kandidat yang cocok dan mewakili aspirasi dari pemilih partai. Kandidat yang sesuai akan membuat pemilih teridentifikasi dan punya



kedekatan dengan partai. Kedekatan dengan partai ini akan bisa digunakan oleh pemilih untuk memilih kandidat yang didukung oleh partai.

Bila mengacu pada konsepsi di atas, maka, keberhasilan partai dalam PEMILUKADA ditentukan oleh faktor sinergisitas antara berjalannya mesin partai sampai ke pemilih akar rumput dan ketepatan partai dalam mengusung pasangan calon yang didukung oleh partai sesuai dengan harapan pemilihnya. Sementara kegagalan partai dalam PEMILUKADA adalah mencalonkan pasangan kandidat yang tidak sesuai dengan harapan pemilih serta tidak berfungsinya mesin partai sampai pada tingkat akar rumput.

## 2. Pengaruh Kekuatan Partai Koalisi

Dari penyelenggaraan PEMILUKADA 2005, terdapat beberapa kecenderungan hasil koalisi yang bisa diidentifikasi. Pertama, dari evaluasi yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) misalnya, ternyata, hanya sekitar 37,7 persen pemenang PEMILUKADA yang diusung oleh partai atau koalisi partai pemenang pemilu legislatif di daerah yang bersangkutan. Sedangkan sebagian besar, 72,3 persen PEMILUKADA dimenangkan oleh partai atau koalisi partai bukan pemenang pemilu legislatif (LSI, “*Analisis Perilaku Pemilih Berdasar Data Agregat PEMILUKADA*”, Oktober 2005). Hal ini jelas menunjukkan bahwa faktor figur atau ketokohan kandidat sangat menentukan dalam pertarungan PEMILUKADA ketimbang basis partai para calon.

Kedua, ternyata tidak semua partai besar yang memiliki kursi paling banyak di DPRD dapat memenangkan kompetisi PEMILUKADA. Daya tarik dan popularitas figur pasangan kandidat menjadi faktor penting selain basis partai dan gabungan partai yang menjadi wadah pencalonan. Hal ini sekaligus mengindikasikan, sejatinya, sekalipun partai-partai besar menang dalam pemilu legislatif, tetapi, partai tersebut tidak cukup berakar dan tidak memiliki basis sosial yang jelas di Nusa Tenggara Barat.

Ketiga, menurut catatan Harian Kompas (Kompas, “*Setahun PEMILUKADA Golput Meningkat*”, tanggal 20 Juni 2006), ternyata, 40,4 persen pemenang PEMILUKADA adalah para *incumbent*, sedangkan sisanya beragam dan berasal dari berbagai unsur, baik gabungan politisi dan pengusaha, maupun aliansi antara birokrat dan pengusaha. Kemenangan hampir 60 persen *incumbent* ini diduga kuat berkaitan dengan format PEMILUKADA versi UU No. 32/2004 yang memungkinkan para pejabat lama memengaruhi birokrasi bawahan mereka di daerah. Seperti diketahui, peraturan perundangan PEMILUKADA tidak mewajibkan para kepala daerah/wakil kepala daerah untuk mundur dan atau berhenti sementara sebelum mereka maju kembali dalam pertarungan PEMILUKADA.

Keempat, walaupun belum ada data akurat, tampaknya tidak semua pasangan kandidat yang diduga memiliki dana kampanye yang besar dapat memenangkan kompetisi PEMILUKADA. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa dengan secara berangsur masyarakat Indonesia juga belajar dari pengalaman mereka dari pemilu-pemilu sebelumnya. Realitas ini tentu merupakan gejala positif karena memperlihatkan bahwa para pemilih sebenarnya memiliki rasionalitas politik sendiri yang belum tentu sama dengan asumsi para elite politik.

### 3. Pengaruh Figur, Mencairnya Ideologi Partai

Menonjolnya peran tigur membuat ideologi partai politik di Kota Tangerang Selatan mencair karena basis dukungan politik ada pada patron tokoh agama, sehingga, pertimbangan kealisi bukan lagi berdasarkan pada ideologi partai. Kalaupun ada, hanya merupakan suatu kebetulan. Realitas empiris ini diakui oleh Ketua PKS Tangerang Selatan, Unggul Wibowo; "... polarisasi partai di Kota Tangerang Selatan tidak ada, apapun partainya, pendekatan Islam termasuk Golkar dilakukan lewat kampanye Yasinan bersama, dan pembagian Al-Qur'an. Jadi, PEMILUKADA bukan merupakan koalisi ideologi, tetapi, koalisi program." (Wawancara bersama Unggul Wibowo, Ketua PKS Tansel Sabtu, 7/1/2012).

Oleh karena itu, pada PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan putaran kedua yang berlangsung pada 27 Februari 2011, yang relevan untuk melihat pengaruh akibat koalisi hanya *Minimal Connected Coalitions* (kedekatan orientasi kebijakan). Sebab, kemenangan tidak dilihat sejauhmana banyaknya jumlah partai bergabung dalam satu koalisi. Akan tetapi seberapa dekatnya orientasi kebijakan partai, pertimbangan ini ditempuh mungkin untuk memudahkan penyatuan pemilih partai, dan sejauhmana sensitifnya partai melihat peluang kemenangan berdasarkan analisis kultur pemilih yang ingin direbut, dan calon seperti apa yang serasi dengan harapan dan budaya pemilih tersebut. Fakta politik demikian yang terjadi pada PEMILUKADA di Kota Tangerang Selatan, dengan dimenangkan Airin – Benyamin, adalah karena kesamaan orientasi program partai pengusung, serta kecocokan figur calon dengan harapan pemilih dan budaya masyarakat. Jadi, sumbangsih mesin koalisi yang bisa diukur hanya pada meraih legitimasi politik dan kepentingan politik teknis yaitu bila partai tidak mendapatkan dukungan 15 persen kursi atau 15 suara pada pemilu legislatif.

### 4. Pengaruh Tipologi Pemilih

Keberadaan pemilih dalam politik sering diposisikan sebagai konsumen politik. Karena partai politik membutuhkan suara para pemilih atau kontestannya agar bisa eksis dalam dunia politik. Karena posisi pemilih yang sedemikian, maka, partai politik harus memahami tipologi pemilih sebagai tindakan politik yang pasti dalam merumuskan kemenangannya. Bila hal itu tidak dilakukan, berarti, partai politik telah gagal dalam merumuskan tujuannya terlibat dalam politik praktis. Fenomena keputusan politik adalah sesuatu yang kompleks karena melingkupi faktor sosial, budaya, geografis, sejarah, dan psikologis harus mampu dimobilisasikan dengan secara komprehensif.

Pertimbangan pemilih juga dipengaruhi oleh tiga faktor pada saat yang bersamaan: pertama, kondisi awal pemilih; kedua, media massa; ketiga, partai politik atau kontestan. Kondisi awal diartikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri si pemilih. Masing-masing individu mewarisi dan memiliki sistem nilai serta kepercayaan yang berbeda satu sama lain, (sosial budaya, nilai tradisional, level pendidikan dan ekonomi). Hal ini sangat memengaruhi proses dalam diri masing-masing individu ketika hendak menentukan pilihannya.

Faktor kedua yang memengaruhi pemilih adalah media massa. Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi merupakan kekuatan dalam membentuk opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar

informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika semua pemberitaan media massa tentang suatu partai politik atau kontestan bersifat positif, maka, masyarakat cenderung melihat keberadaan partai politik tersebut sebagai sesuatu yang positif pula. Begitu sebaliknya, ketika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan partai politik atau kandidat, masyarakat pun cenderung menilai negatif.

Faktor ketiga adalah karakteristik partai politik dan kontestan itu sendiri. Pertimbangan mayoritas masyarakat pemilih dalam memberikan pilihannya terhadap calon tertentu pada PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan, menurut hemat penulis juga dipengaruhi oleh ketiga faktor yang tersebut di atas.

## 5. Pengaruh Kultur Masyarakat

Dari sisi budaya, masyarakat Kota Tangerang Selatan dapat dikelompokkan menjadi tiga suku besar, yaitu suku Sunda, suku Betawi dan suku Jawa serta Tionghoa keberadaan tiga suku dan berbagai keragaman budaya yang dihasilkan, bisa dihubungkan dengan sejarah masa lalu dan perkembangan budaya di daerah tersebut.

Legitimasi tradisional dan legitimasi ideologis sangat inheren dengan budaya masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam memberikan dukungan politik, pengakuan terhadap elit lokal untuk menjadi pemimpin. Pada konteks inilah teori Max Weber mampu menggambarkan sumber kekuasaan dengan menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundang-undangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma. Sumber terakhir ini yang mampu mendeskripsikan fenomena politik Kota Tangerang Selatan secara umum.

Sekalipun sejatinya “memilih” masuk dalam kategori *private politics*, *personal politics*, tetapi, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu tidak merupakan kewajiban, tetapi diatur sebagai hak masyarakat, maka, hal itu juga yang diatur dalam sistem demokrasi. Dalam masyarakat dengan budaya politik subjek cenderung acuh tak acuh terhadap pilihan politik jika pemilihan politik tersebut tidak memiliki makna ekonomis, sosial dan politik baginya. Sehingga efeknya pun menurut penulis akan menyebabkan pilihan politik masyarakat jauh lebih otonom, di antaranya adalah :

1. Masyarakat tidak mudah dimobilisasi oleh kepentingan politik tertentu yang tidak bermakna baginya.
2. Tingkat golput tinggi dalam suksesi kepemimpinan nasional maupun daerah akan tinggi jika para calon tidak mencerminkan pemerintah yang jujur, amanat, atau tidak sesuai dengan kehendaknya.
3. Lembaga-lembaga agama tidak memiliki pengaruh dalam memberikan fatwa politik.
4. Imparsialitas pemilih semakin kokoh dalam menentukan hak pilihnya.

Namun, dalam kultur politik masyarakat Kota Tangerang Selatan, yang beragam pertimbangan manfaat secara ekonomis (untung-rugi) baik secara individu maupun kelompok mungkin tidak terlalu dirasakan adanya, sekalipun diyakini ada pemilih yang berdasar pada pertimbangan yang sedemikian. Hubungan transaksional-pragmatis tetap ada dalam zona *the real* kompetisi politik, terutama untuk kepentingan dalam memobilisasi massa pendukung.

## 6. Keunggulan Pasangan Serasi

Komposisi pasangan Airin dan Benyamin dianggap serasi oleh kebanyakan orang ketimbang calon pasangan yang lain. Airin dianggap tokoh wanita muda berusia 36 tahun yang “bijak”, integritas moralnya tinggi. Juga bisa disebut mewakili pemimpin tipe “*solidarity makers*” yaitu pemimpin yang dianggap mempunyai kekuatan untuk membangun hubungan emosional dengan masyarakat melalui modal kharisma yang dimilikinya.

Sebagai seorang tokoh wanita, Airin tidak termasuk dalam kalangan tokoh agama yang fanatik, tetapi, tidak juga serta-merta menolak seluruh hal yang berbau “modern”. Ia memegang prinsip *Almufahazatu 'ala-Iqadimasholeh, wal akhdzu bil jadidil ashlan* atau memelihara tradisi yang baik dan menerima hal baru yang baik -- selain itu, Airin juga bukan dari kalangan birokrasi tapi dari aktivis sosial yang aktif di tengah masyarakat, misalnya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), pengelola sampah mandiri, sebagai pengacara yang banyak membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah, penguru Masyarakat Gemar Membaca dan aktif pada kegiatan Majelis Taklim Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan Benyamin Davnie dianggap birokrat yang profesional dan tergolong pada tipe pemimpin yang mewakili “*administrator maker/problem solvers*”. Tipe pemimpin ini dianggap memiliki kapasitas manajemen pemerintahan yang bagus dengan pengalaman birokrat dan banyak berkecimpung dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Benyamin juga tokoh pemuda yang andal pada masa lalu yaitu sebagai mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) dan Kwartir Pramuka Kabupaten Tangerang. Benyamin menyandang gelar pegawai negeri dengan prestasi luar biasa selama 27 tahun. Ia juga sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang yang cukup presitisius di antaranya sukses dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2007, dan Benyamin melakukan langkah awal program ini dengan membentuk fasilitator yang direkrut secara profesional dari masyarakat yang akan ditempatkannya di setiap kecamatan. Fasilitator yang dibentuk itu langsung membentuk pelaksana kegiatan dari tingkat desa dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan yang ada di kecamatan dalam bentuk Badan Kelompok Masyarakat (BKM). Sebuah penghargaan nasional atas karya, dedikasi, dan loyalitas di bidang pembangunan nasional dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintahan khususnya Kabupaten Tangerang pun berhasil diraihinya. Kelebihan dari pasangan Airin – Benyamin membuat masyarakat menaruh harapan besar untuk menata Kota Tangerang Selatan pada masa baktinya tahun 2010 – 2015.

## F. Simpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis atas faktor kemenangan pasangan Airin – Benyamin pada PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan 2010 dan 2011, maka, simpulan menggambarkan bahwa faktor kemenangan itu tidak berdiri sendiri (bukan faktor tunggal), banyak faktor dan variabel yang mempengaruhinya. Kemenangan itu adalah akumulasi dari faktor-faktor potensial yang ada dalam internal individu para kontestan yang mampu menggerakkan potensi eksternal secara maksimal.

Setidaknya, selain keterlibatan birokrat, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan Airin – Benyamin, di antaranya adalah: figur calon, pengaruh tipologi pemilih, pengaruh komunikasi politik secara langsung, komposisi pasangan calon yang serasi, dukungan penuh pemilih partai pengusung, dan sudah barang tentu adanya kelemahan pasangan calon lain.

Faktor figur calon sebagai kekuatan sentral sangat efektif dalam merebut suara para pilih pada PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan. Pengaruh tersebut dirasakan betul oleh kontestan yang memiliki bobot popularitas tinggi yang lahir dari *background* golongan yang disegani di wilayah Banten, selain itu juga didukung oleh finansial yang memadai. Rasanya, bila tidak memiliki *shortcut* (modal) yang cukup, akan sulit memenangkan kompetisi PEMILUKADA di Tangerang Selatan. Kelebihan faktor figur tersebut membuat pasangan Airin – Benyamin mampu mengungguli ketiga pasangan lainnya.

Sumbangsih pengaruh tipologi pemilih atas kemenangan salah satu pasangan calon sangat menentukan dipilih atau tidak dipilih. Sekalipun keberadaan pemilih dalam politik sering diposisikan sebagai konsumen politik. Tipologi pemilih Kota Tangerang Selatan, yang memotivasi mereka dalam memberikan dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon. Bila mengacu pada hasil penelitian, maka, kecenderungan 'memilih' pasangan atau calon karena wibawa ketokohan calon itu sendiri, di samping kekuatan partai koalisi yang mengusung, kekuatan uang (hubungan transaksional-pragmatis), program kerja yang bagus, dan ideologi.

Kenyataan menunjukkan pemilih lebih banyak menggunakan faktor non rasional seperti intuisi, keyakinan, sistem nilai, anggapan umum masyarakat, emosi, kesukaan, loyalitas, budaya, norma, agama, dan kondisi sosial lebih mampu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap atas perilaku pemilih. Politik bukanlah dunia ekonomi klasik yang lebih mengedepankan kalkulasi untung-rugi. Di dalam politik terdapat juga alasan-alasan sosial, ideologis serta kepentingan umum. Masyarakat lebih menekankan aspek yang mereka rasakan ketimbang pertimbangan logis kalkulatif.

Komunikasi politik secara langsung, ditambah dengan pengaruh komunikasi kampanye secara langsung menjadi keunggulan pasangan Airin – Benyamin bila dibandingkan dengan pasangan calon lain yang mengutamakan kampanye lewat media massa atau yang sejenisnya.

Adanya kelemahan pasangan calon, tentu dari kemenangan pasangan Airin – Benyamin pada PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan 2010 dan 2011 tidak terlepas dari faktor kelemahan pasangan calon lain. Mulai dari sosok atau figur yang kurang memiliki popularitas, minim prestasi, strategi kampanye yang tidak menyentuh masyarakat pemilih, serta konsolidasi dukungan pemilih partai yang tidak solid.

## Daftar Pustaka

- Ambardi, Kuskrido. 2009. *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Keparintaan di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: KPG.
- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arifin, Imron. 1994. *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologo Komunikasi*, Jakarta, Kencana.
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (terj. A. Rahman Zainuddin), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Djohan, Djohermansyah. 2008. "Pemerintahan Daerah di Era Reformasi: Perjalanan Mencari Format Demokrasi Lokal" dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Institute Pemerintahan Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri*, Jakarta 15 November.
- Firmanzah, *Marketing*. 2008. *Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*.
- Haris, Syamsuddin. 2006. "Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada" dalam [www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada](http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada), diakses pada November 2008.
- Hasil Penelitian Litbang JPPR atas 50 Pilkada yang berlangsung antara bulan Februari 2007 sampai Januari 2008.
- Hidayat, Syarief. 2001. "Hidden Anatomy" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 3/Tahun II Januari.
- Junaidi, Veri. 2010. "Pilkada 2010 Penuh Kecurangan" dalam *Seputar Indonesia*, Kamis 16 Desember.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- LSI. 2006. "Analisis Perilaku Pemilih Berdasar Data Agregat Pilkada, Oktober 2005" dalam "Makalah Dirjen Otonomi Daerah Depdagri pada acara *Evaluasi Satu Tahun Pilkada*" 28 Juni di Jakarta

- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis; Source Book of New Methods*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Moleong, Alex J. 2003. *Metode Peneliiian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.
- Mulyana, Dedy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
- Pantoh, Coen Husain. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book.
- Romli, Lili. 2007. "Kecenderungan Pilihan Masyarakat dalam Pilkada Langsung di Indonesia" dalam *Jurnal Politik Program Magister Ilmu Politik Universitas Nasional* Vol. 3 No. 2.
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wajah Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, A. 2002. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Agus: 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Poiitik*. Jakarta: Gramedia.
- Sucipto, Bambang. 2000. *Partai Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi daerah*.
- Sonhadji, Ahmad. 1994. *Teknik Pengumpulan Data Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimasahada Press.
- S.P, Varma. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

